



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**JL. RAYA DRINGU NO. 13
KOTA PROBOLINGGO**

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tugas	: a. Perumusan Kebijakan Daerah Di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat; b. Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat; c. Pelaksanaan Administrasi Dinas Daerah Di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat; d. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Daerah Di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat; e. Pelaksanaan Fungsi Dinas Lain Yang Diberikan Oleh Wali Kota Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Urusan Yang Terselesaikan}}{\text{Jumlah Urusan Yang Ditargetkan}} \times 100\%$	Sekretariat
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif	1 Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial}}{\text{Total PPKS Yang Terdata}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		2 Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA		
		3 Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan / atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar		

		4 Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial		
		5 Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial		
		1 Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$\frac{\text{Jumlah PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial}}{\text{Total PPKS Yang Terdata}} \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial
		2 Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
		3 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
		4 Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
		5 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Meningkatnya	1 Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah PPKS Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial}}{\text{Total PPKS Yang Terdata}} \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi Sosial dan
		2 Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		

	Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif	3. Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		Perlindungan Jaminan Sosial
		1 Persentase korban bencana alam, sosial, dan / atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah PPKS Yang Mendapatkan Penanganan Bencana}}{\text{Total PPKS Yang Terdampak Bencana}} \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial
		2 Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya		
		3 Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial		
		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	$\frac{\text{Total TMP Yang Terkelola}}{\text{Total TMP Yang Terdata}} \times 100\%$	
3	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	1 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah Yang Berperan Dalam PUG}}{\text{Total Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah Yang Terdata}} \times 100\%$	
		2 Persentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender		
		Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	$\frac{\text{Jumlah Kasus Yang Tertangani Dengan Baik}}{\text{Jumlah Kasus Yang Diterima}} \times 100\%$	
		Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Pasangan Yang Mendapatkan Pembelajaran Keluarga}}{\text{Jumlah Pasangan Yang Menikah}} \times 100\%$	

		Tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	$\frac{\text{Jumlah Data Yang Sudah Terpilih Gender dan Anak}}{\text{Total Data Yang Dikumpulkan}} \times 100\%$	
5	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	$\frac{\text{Jumlah Indikator Yang Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Yang Ditetapkan}} \times 100\%$	
		1 Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	$\frac{\text{Jumlah Kasus Perempuan Yang Tertangani Dengan Baik}}{\text{Total Kasus Perempuan Yang Diterima}} \times 100\%$	
		2 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	$\frac{\text{Jumlah Indikator Yang Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Yang Ditetapkan}} \times 100\%$	
6	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan kelurahan yang aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Lembaga Kemasyarakatan kelurahan}}$ Definisi Operasional : Kriteria Lembaga Aktif : a. Mempunyai ketetapan/ struktur organisasi; b. Mempunyai penanggung jawab; c. Terlaksananya program kegiatan (minimal 75 %).	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan	: Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tugas	: Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan serta penyusunan program dan keuangan
Fungsi	: a. pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas; b. Pelaksanaan administrasi keuangan Dinas; c. Pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Dinas; d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian Dinas; e. Pelaksanaan administrasi umum Dinas; f. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; g. pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; h. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; i. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	$\frac{\text{Capaian Kinerja Kegiatan Yang Mencapai Minimal 80\%}}{\text{Seluruh Capaian Kinerja Kegiatan}} \times 100\%$	Data RKPD triwulanan, Realisasi Keuangan SKPD
2		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	$\frac{\text{Capaian Kinerja Administrasi Keuangan yang Terlaksana}}{\text{Seluruh Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan}} \times 100\%$	Data RKPD triwulanan, Realisasi Keuangan Prog Keg
3		Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	$\frac{\text{Pelaporan BMD Yang Terpenuhi dan Disusun Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Laporan BMD yang Harus Dipenuhi}} \times 100\%$	Data BMD
4		Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	$\frac{\text{Pelaporan administrasi Kepegawaian yang terpenuhi dan disusun tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen / laporan kepegawaian yang harus dipenuhi}} \times 100\%$	Simpeg, Data Analisa Kepegawaian, DUK
5		Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	$\frac{\text{Pelaporan administrasi umum yang terpenuhi dan disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen / laporan administrasi umum yang harus dipenuhi}} \times 100\%$	Capaian Kinerja Pelayanan SKPD, SPP, SO

6		Presentase Ketatalaksanaan Tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan kebutuhan ketatalaksanaan yang terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh kebutuhan BMD}} \times 100\%$	Data Arsip Dokumen kedinasan, DIsposisi
7		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh layanan penunjang urusan pemerintah}} \times 100\%$	Dokumen Pembyaran Listrik, Air dan Surat Menyurat
8		Persentase Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan pemeliharaan BMD yang terlaksana}}{\text{Jumlah seluruh kebutuhan pemeliharaan BMD}} \times 100\%$	RK BMD, Kartu Kendali Inventari Pemeliharaan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Tugas : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, peningkatan kualitas keluarga dan pengelolaan system data gender dan anak
- Fungsi :
- Pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Daerah
 - Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan;
 - Pelaksanaan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
 - Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG);
 - pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;;

- f. pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
- g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjangan Gender	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Program yang dilengkapi Dokumen ARG}}{\text{Jumlah Program dalam APBD Kota Probolinggo}} \times 100\%$	- Dokumen PPRG Perangkat Daerah - APBD Kota Probolinggo
2		Persentase Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial,	Jumlah laporan hasil advokasi dan pendampingan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Data Terpilah - Data sasaran kegiatan

		ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan		pemberdayaan /pelatihan
3		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang difasilitasi untuk penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan	Jumlah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menyampaikan <u>Data Pilah</u> _____ x100% Jumlah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Data Terpilah
4		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil Pengarusutamaan Gender	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan	: Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial
Tugas	: Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana Dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
Fungsi	: a. pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial; b. pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial; c. pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar; d. pelaksanaan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah; e. pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial; f. pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; g. pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal; h. pelaksanaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri, meliputi Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri; dan i. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	- Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$F(x) = \frac{\sum \text{PMKS Luar Panti yang Sudah Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar}}{\sum \text{Populasi PMKS Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial}} \times 100\%$	Laporan persentase jumlah PMKS di luar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar
2	- Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$F(x) = \frac{\sum \text{PMKS Luar Panti yang Sudah Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial}}{\sum \text{Populasi PMKS Luar Panti lainnya yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial}} \times 100\%$	Laporan persentase jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi Sosial
3	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persentase anak terlantar diluar panti yang terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial}}{\text{Jumlah Anak Terlarat}} \times 100\%$	

3	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Dalam DTSEN Yang Diverifikasi Dan Di Validasi}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Dalam DTSEN}} \times 100\%$	
4	Persentase korban bencana alam, sosial, dan / atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan	$\frac{F(x) = \sum \text{Masyarakat Sudah Menerima Bantuan Korban Bencana}}{\sum \text{Masyarakat Penerima Bantuan Korban Bencana}} \times 100\%$	Laporan persentase Jumlah Penerima Bantuan Korban Bencana Alam/ Sosial
	- Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya - Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	$\frac{F(x) = \sum \text{Jumlah Masyarakat Yang Telah Mengikuti Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana}}{\sum \text{SDM Masyarakat Yang Mengikuti Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana}} \times 100\%$	Laporan persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan	: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat
Tugas	: Bidang Pemberdayaan Sosial, Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
Fungsi	: a. pelaksanaan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);; b. pelaksanaan pengumpulan sumbangan dalam Daerah; c. pelaksanaan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah; d. pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional; e. pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah; pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; f. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	- Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial - Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA - Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan / atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar - Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	$\frac{\text{Jumlah PSKS Yang Diberdayakan / Difasilitasi}}{\text{Target Total Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial}} \times 100\%$	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Persentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Sarana Prasarana TMP Kondisi Baik}}{\text{Total Jumlah Seluruh Sarana Prasana TMP}} \times 100\%$	
3	Persentase pemberdayaan Kemasyarakatan (LKK) fasilitasi Lembaga Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah LKK Aktif Berpartisipasi}}{\text{Total Jumlah LKK}} \times 100\%$	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan	: Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak
Tugas	: Di Bidang Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak (PHA) Dan Perlindungan Khusus Anak..
Fungsi	: a. Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah; b. Pelaksanaan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah; c. Pelaksanaan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah; d. Pelaksanaan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak; e. Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah; f. Pelaksanaan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah; Dan g. Pelaksanaan Fungsi Dinas Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	$\frac{\text{Jumlah Kelompok/Lembaga Masyarakat Yang Aktif}}{\text{Total Kelompok/Lembaga Masyarakat}} \times 100\%$	Laporan Kasus Kekerasan Perempuan
		Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan Terimplementasi}}{\text{Total Target Kebijakan}} \times 100\%$	
		Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	$\frac{\text{Jumlah Lembaga (Pemerintah/Non) Yang Disosialisasi}}{\text{Total Jumlah Lembaga Penyedia Layanan}} \times 100\%$	Sertifikat Lembaga Penyedia Layanan
	Persentase Fasilitasi Perumusan dan Penguatan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Persentase Fasilitasi Perumusan dan Penguatan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan / Dokumen Yang Difasilitasi}}{\text{Total Target Kebijakan/Dokumen}} \times 100\%$	Laporan Peningkatan Kapasitas Keluarga

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	Persentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelembagaan PHA	$\frac{\text{Jumlah Lembaga (pemerintah/Non/Dunia usaha) Yang Berperan Aktif}}{\text{Total Lembaga (Pemerintah/Non/Dunia Usaha)}} \times 100\%$	Lembaga Yang Ada di Kota Probolinggo
		Persentase kelurahan, kecamatan layak anak		Laporan Kecamatan
3	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	$\frac{\text{jumlah anak (penduduk usia kurang 18 Tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi}}{\text{jumlah anak (penduduk usia kurang 18 Tahun) korban kekerasan yang menjadi kewenangan Kabupaten}} \times 100\%$	
		Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah AMPK Yang Mendapatkan Layanan/Pendamping}}{\text{Total Jumlah AMPK Yang Terdata}} \times 100\%$	Laporan Kekerasan Terhadap Anak
		Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Layanan AMPK yang Dikuatkan/Dikembangkan}}{\text{Total Lembaga Layanan AMPK}} \times 100\%$	Lembaga di Kota Probolinggo